

## ABSTRAK

Masyarakat Nagari Taluak IV Suku di Kabupaten Agam memiliki sistem hukum adat yang kuat, khususnya dalam pengelolaan tanah ulayat yang tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan adat dan pembayaran *uangjariah*. Permasalahan timbul ketika terjadi ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam pelaksanaan peran Notaris/PPAT dalam proses transaksi tanah dan penyelesaian sengketa adat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana peran budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat dan bagaimana peran Notaris/PPAT berdasarkan rekognisi budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis peran budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat khususnya di Nagari Taluak IV Suku dan untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT berdasarkan rekognisi budaya hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang berasal dari karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan dan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa budaya hukum masyarakat sangat memengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Notaris/PPAT memiliki peran penting dalam mengharmonisasikan atau menjadi jembatan dalam mengakomodasikan hukum adat dan hukum nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya hukum masyarakat di Nagari Taluak IV suku memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa adat, maka setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat haruslah mempertimbangkan nilai-nilai adat. Hal tersebut juga sejalan dengan Peran Notaris/PPAT dalam mengakomodasikan atau menjembatani antara hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat adat dan hukum nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara. Adapun usulan agar Notaris/PPAT diberikan pedoman khusus terkait transaksi

tanah ulayat secara adat, diperlukan penyusunan peraturan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan daerah (perda).

Kata Kunci: Rekognisi, Budaya Hukum, Tanah Ulayat, Hukum Adat, Notaris/PPAT

## **ABSTRACT**

The Nagari Taluak IV Suku community in Agam Regency has a strong customary law system, especially in the management of customary land which cannot be transferred without customary approval and payment of jariah money. Problems arise when there is a mismatch between customary law and national law, especially in the implementation of the role of Notary/PPAT in the process of land transactions and customary dispute resolution. The problems raised in writing this thesis are how the role of community legal culture in resolving customary disputes and how the role of Notary/PPAT based on the recognition of community legal culture in resolving customary disputes. The purpose of this thesis research is to analyze the role of community legal culture in resolving customary disputes, especially in Nagari Taluak IV Suku and to analyze the role played by Notary / PPAT based on the recognition of community legal culture in resolving customary disputes. This research method uses a type of sociological juridical research. The specification in this research is descriptive analytical. The types of data used in this research are secondary data, namely those derived from scientific works and laws and regulations and primary data, namely data obtained directly in the field through interviews and document studies. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is that the legal culture of the community greatly influences the process of resolving customary land disputes. Notary/PPAT has an important role in harmonizing or becoming a bridge in accommodating customary law and national law. The conclusion of this research is that the legal culture of the community in Nagari Taluak IV Suku tribe has an important role in resolving customary disputes, so every legal action related to customary land must consider customary values. This is also in line with the role of Notary / PPAT in accommodating or bridging between customary law that applies in indigenous peoples and national law that applies to all citizens. As for the proposal that Notary/PPAT be given special guidelines related to customary land transactions, it is necessary to prepare regulations both in legislation and in regional regulations (perda).

Keywords: Recognition, Legal Culture, Customary Land, Customary Law,  
Notary/PPAT